

Potensi
**USAHA
MIKRO
KECIL**
Provinsi NTT



Potensi
**USAHA
MIKRO
KECIL**
Provinsi NTT



**POTENSI USAHA MIKRO KECIL
SENSUS EKONOMI 2016 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No. ISBN: 978-602-6786-42-5
No. Publikasi: 53560.1815
No. Katalog: 9102067.53

Ukuran Buku: 20 cm x 20 cm
Jumlah Halaman: vi + 28 halaman

Naskah: Bidang Neraca dan Analisis Wilayah

Penyunting: Bidang IPDS

Desain Kover oleh: Bidang IPDS

Diterbitkan oleh: © Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Tata Letak: Bidang IPDS

Sumber Ilustrasi: www.freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Kata Pengantar



Pada tahun 2016, BPS telah melaksanakan kegiatan pendataan lengkap atau listing Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016). Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai aktivitas Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB), pada tahun 2017 dilakukan SE2016-Lanjutan.

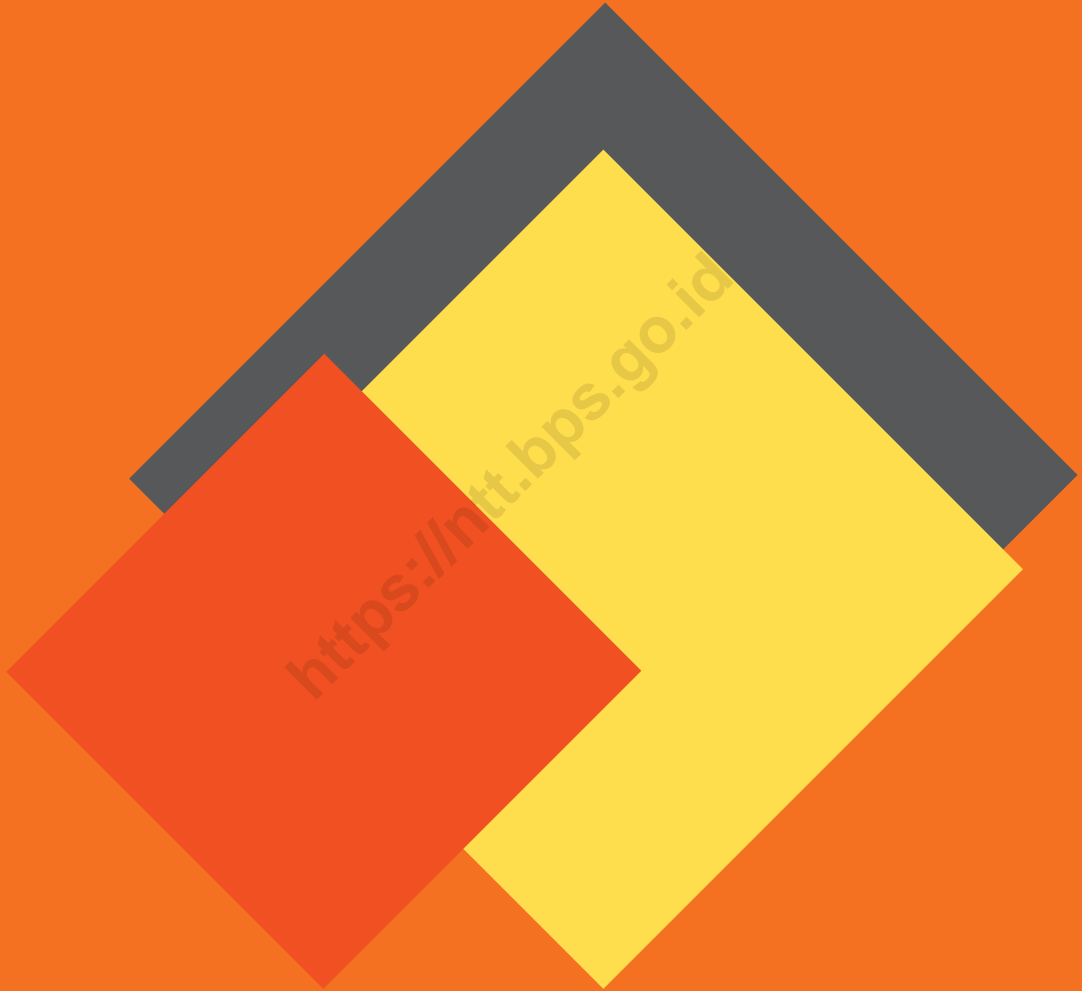
Hasil pendataan SE2016-Lanjutan dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis dan perumusan kebijakan di antaranya untuk mengukur kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan memberikan gambaran karakteristik/kualitas sumber daya manusia, kondisi aksesibilitas permodalan, prospek usaha, dan kinerja keuangannya. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah untuk membantu pengembangan UMK baik melalui pembinaan maupun penyusunan regulasi yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK. Dengan demikian, peran UMK dalam kegiatan ekonomi lokal semakin kuat. Lapangan pekerjaan pun makin meningkat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan SE2016-Lanjutan.

Kupang, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Timur

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maritje Pattiwaellapia'.

Maritje Pattiwaellapia



<https://ntt.bps.go.id>

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
PENDAHULUAN	1
UMK MENDOMINASI JUMLAH USAHA DI NTT	3
UMK SEBAGAI PENYERAP TENAGA KERJA TERBANYAK	7
PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA	11
PELAKU UMK PERLU MENINGKATKAN KAPABILITAS KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN	17
PROSPEK DAN KENDALA USAHA	25

Kategori



B. Pertambangan dan Penggalian



C. Industri Pengolahan



D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin



E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi



F. Konstruksi



G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor



H. Pengangkutan dan Pergudangan



I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum



J. Informasi dan Komunikasi



K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi



M, N. Jasa Perusahaan



P. Pendidikan



Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial



R,S. Aktivitas Jasa Lainnya

Pendahuluan

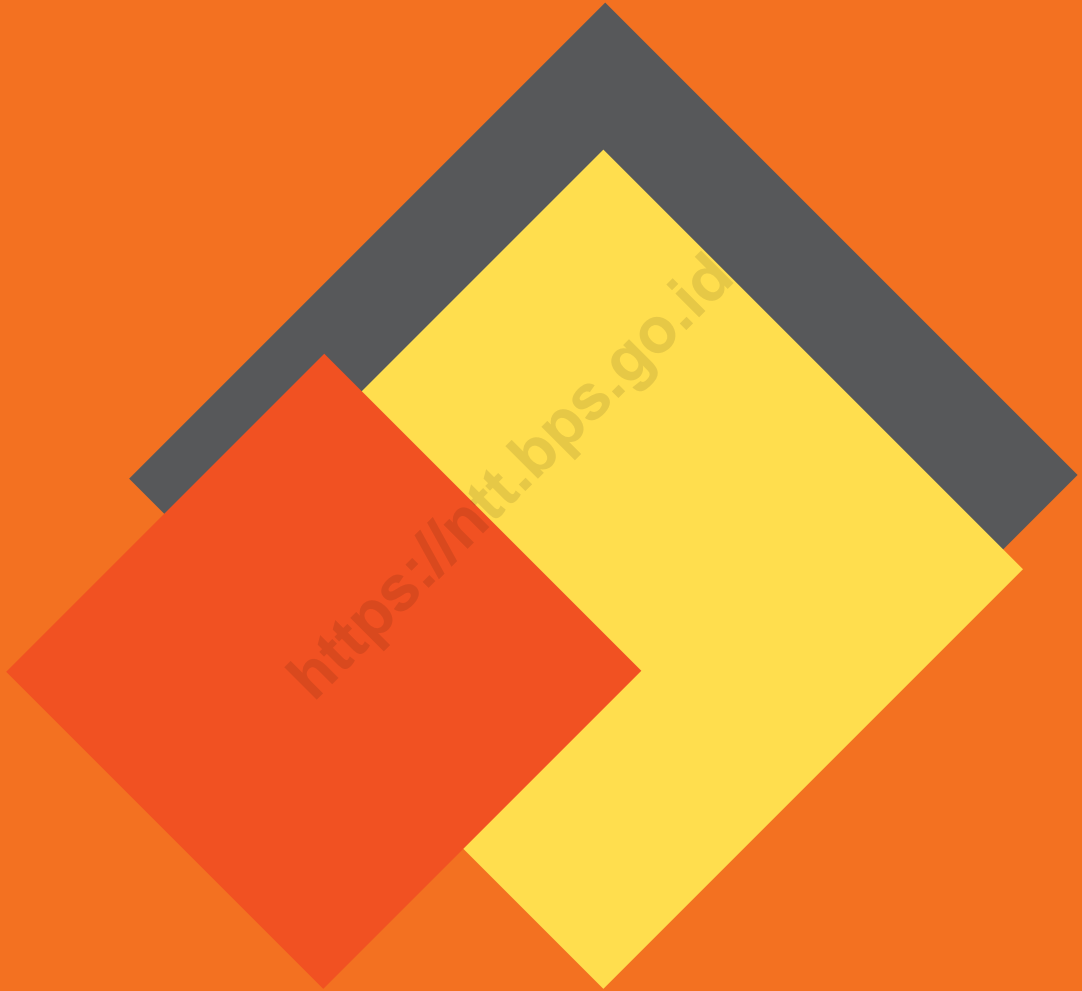
Dunia usaha di NTT pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari hasil SE2016-Lanjutan, jumlah usaha ini mencapai 99 persen dari total usaha non pertanian di provinsi ini. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja sekitar 92 persen dari total tenaga kerja usaha non pertanian.

Ketika krisis menerpa Indonesia pada sekitar tahun 1997-1998, UMK terbukti tetap berdiri kokoh di saat usaha-usaha besar lainnya berjatuh. Keunggulan UMK dalam bertahan dari badai krisis karena berbagai alasan. Pertama, umumnya UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, UMK tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Ketiga, umumnya bisnis UMK menggunakan modal relatif rendah. Dengan keunggulan tersebut, UMK tidak begitu merasakan pengaruh krisis global yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah yang dalam.

Meskipun mempunyai beberapa keunggulan, UMK juga mempunyai banyak keterbatasan sehingga usaha ini tidak mampu untuk berkembang. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan; kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah; dikelola dengan cara yang sederhana; penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor.

Mengingat pentingnya peran UMK dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia, hendaknya kendala dan keterbatasan tersebut tidak menyurutkan pelaku UMK untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya. Peluang untuk mengembangkan bisnis UMK terbuka lebar jika pelaku UMK mampu membaca situasi pasar. UMK mempunyai peran yang penting khususnya pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumberdaya alam maupun padat tenaga kerja.

Untuk melihat potensi dan kinerja UMK saat ini, serta untuk melihat prospeknya di masa mendatang, perlu melakukan analisis kinerja UMK. Hal ini juga bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan melalui pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi. Dengan adanya identifikasi kinerja UMK dan permasalahan yang dihadapi, maka akan memberikan sumbangsih dalam penyusunan regulasi atau kebijakan yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK



**UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI
NTT**

Bagian

1

<https://ntt.bps.go.id>

UMK mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia dan NTT secara khusus. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu aktivitas UMK merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya seperti jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti dan tempat usahanya tidak selalu menetap atau sewaktu-waktu dapat berpindah. Kondisi ini tergambar dari lama beroperasinya sebagian besar UMK yang kurang dari 10 tahun. SE2016-Lanjutan mencatat, 65 persen UMK di NTT mulai beroperasi secara komersial di atas tahun 2005.

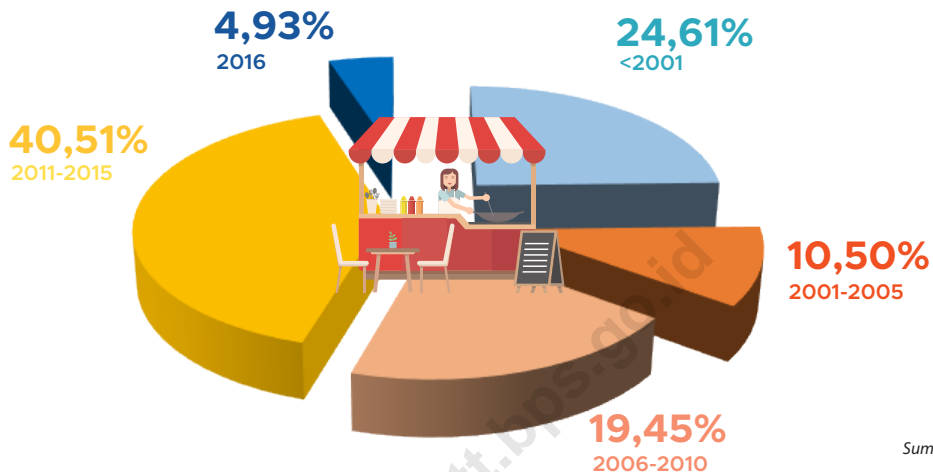
Jumlah UMK di NTT tahun 2017 sebanyak 99,45 persen dari total jumlah usaha non pertanian di provinsi ini. Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMK dengan jumlah sekitar 43 persen. Disusul usaha Industri Pengolahan (Kategori C) sekitar 28 persen. Sedangkan, Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi

(Kategori E) merupakan usaha dengan jumlah paling sedikit yakni hanya 0,24 persen.

Berdasarkan pulau, terlihat pola persebaran yang hampir sama antara jumlah penduduk dengan jumlah UMK. Pulau Flores dengan porsi penduduk tertinggi juga memiliki UMK terbanyak disusul pulau Timor. Sementara, baik jumlah penduduk dan UMK di pulau Sabu merupakan yang terendah.

UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI
NTT

Gambar 1.1.
Persentase Jumlah UMK Menurut Tahun Mulai Beroperasi, 2017



Sumber: BPS, SE2016-L

Gambar 1.2.
Persentase Jumlah UMK Menurut Kategori, 2017



Sumber: BPS, SE2016-L

Tabel 1.
Persentase Penduduk dan UMK Menurut Pulau, 2017

Pulau	Penduduk	UMK
Timor	35,92	35,88
Rote	3,02	3,47
Sabu	1,73	0,81
Flores	38,12	40,57
Alor	3,84	3,89
Lembata	2,60	2,88
Sumba	14,77	12,50
Total	100,00	100,00



**UMK
SEBAGAI
PENYERAP
TENAGA KERJA
TERBANYAK**

Bagian

2

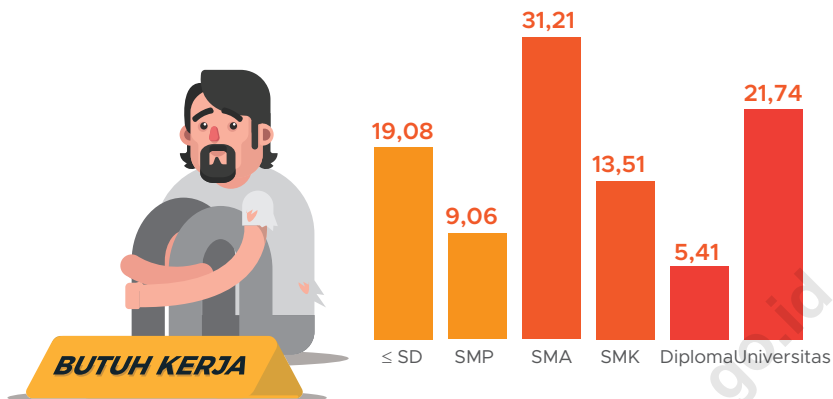
<https://ntt.bps.go.id>

Jumlah UMK yang sangat besar tentunya sangat berperan untuk menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Berdasarkan data Sakernas 2017, tingkat pengangguran di NTT sebesar 3,27 persen dan lebih dari 70 persen diantaranya berpendidikan menengah ke bawah yang secara umum *soft skill*nya masih rendah. Karena itu, pembekalan keterampilan bagi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah ini akan menjadi aksi yang sangat strategis agar mereka mampu menciptakan usaha sendiri dan UMK merupakan salah satu wadah yang paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki *skill* tinggi.

Data SE2016-Lanjutan memberikan informasi bahwa UMK di NTT telah menyerap sekitar 92 persen tenaga kerja usaha non pertanian. Penyerapan tenaga kerja UMK paling banyak terdapat pada usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G). Namun, secara rata-rata, aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial (Kategori Q) dan Pendidikan (Kategori P) memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu sekitar 16 pekerja dan 12 pekerja per usaha. Secara keseluruhan, penyerapan tenaga kerja UMK di NTT hanya sebesar 2 pekerja per usaha.

UMK
SEBAGAI
PENYERAP
TENAGA
KERJA
TERBANYAK

Gambar 2.1.
Tingkat Pengangguran menurut Pendidikan, 2017

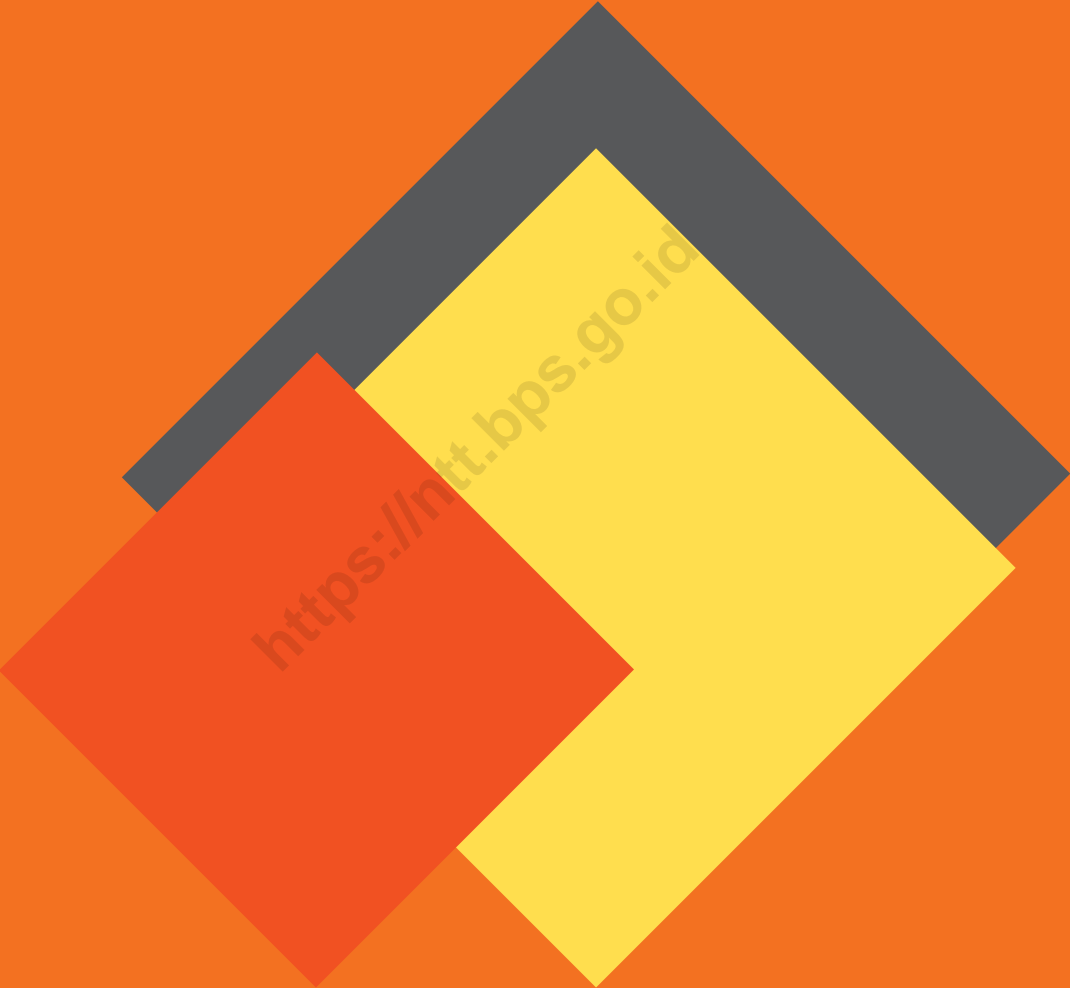


Sumber: Profil Ketenagakerjaan dan Pengangguran Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017

Gambar 2.2.
Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Non pertanian Menurut Kategori, 2017

Kategori	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja
B. Pertambangan dan Penggalian	7.099	16.633	2
C. Industri Pengolahan	121.861	252.085	2
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	2.321	3.767	2
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1.014	2.099	2
F. Konstruksi	8.249	47.428	6
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	184.165	350.175	2
H. Pengangkutan dan Pergudangan	33.444	56.859	2
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	24.462	51.193	2
J. Informasi dan Komunikasi	16.157	25.553	2
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1.598	7.188	4
L. Real Estat	4.635	6.214	1
M, N. Jasa Perusahaan	6.000	14.578	2
P. Pendidikan	11.092	135.777	12
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	1.405	22.103	16
R,S. Aktivitas Jasa Lainnya	6.810	13.177	2
Total	430.312	1.004.829	2

Sumber: BPS, SE2016 Lanjutan



**PENGELOLAAN
UMK
DILAKUKAN
SECARA
SEDERHANA**

Bagian

3



PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA

UMK memiliki karakteristik informal, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh UMK. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja UMK adalah menjalin kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar untuk mendapatkan pembinaan, bantuan modal, bantuan pemasaran, pengadaan bahan baku, dan lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMK sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

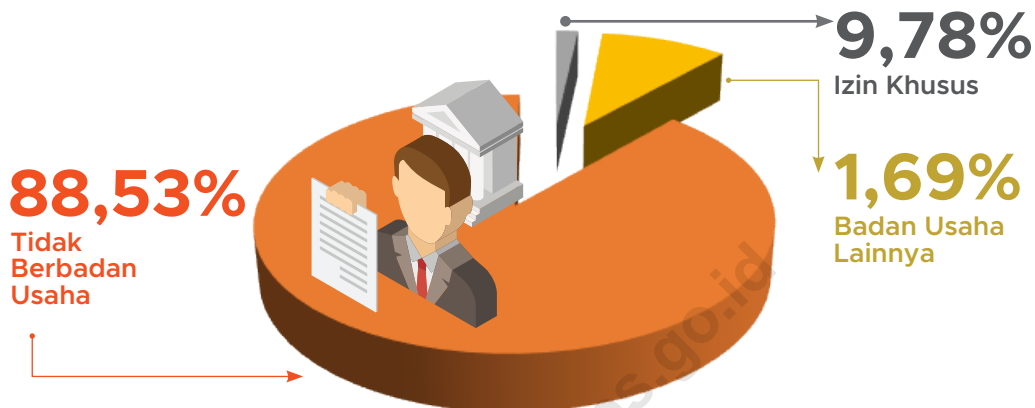
Data SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa pengelolaan UMK dilakukan secara sederhana tercermin dari status badan hukum dan penggunaan teknologi. Di NTT, jumlah UMK yang tidak berbadan usaha masih sangat mendominasi yaitu hampir mencapai 90 persen. Mayoritas UMK juga belum menggunakan komputer dan memanfaatkan internet. Komputer dan internet tidak hanya bermanfaat untuk melakukan laporan keuangan, juga bermanfaat untuk mendesain produk, pemasaran dan lain-lain. Sayangnya,

kurang dari lima persen UMK yang menggunakan komputer dan memanfaatkan internet.

Untuk meningkatkan pendapatan UMK sekaligus meningkatkan daya saing produknya, kemitraan menjadi salah satu cara yang tepat. Namun demikian, alternatif ini masih belum menjadi pilihan bagi UMK. Keterbatasan informasi menjadi salah satu kendala untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Hanya sekitar enam persen UMK yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

Meskipun masih cukup rendah, pengelolaan aktivitas Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin (Kategori D) dan Jasa Perusahaan (Kategori M,N) terlihat paling baik dibanding aktivitas UMK non pertanian lainnya di NTT. Hal ini tercermin dari variabel-variabel status badan usaha, penggunaan komputer, penggunaan internet dan menjalin kemitraan.

Gambar 3.1.
Persentase UMK Non Pertanian Menurut Status Badan Usaha, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.2.
Persentase UMK Non Pertanian Menurut Penggunaan Komputer dalam Usaha, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.3.
Persentase UMK Non Pertanian Menurut Penggunaan Internet dalam Usaha, 2017

95,02%
Tidak
Menggunakan
Internet



4,98%
Menggunakan
Internet

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.4.
Persentase UMK Non Pertanian Menurut Keikutsertaan dalam Kemitraan, 2017

93,54%
Tidak
Menjalin
Kemitraan



6,46%
Menjalin
Kemitraan

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

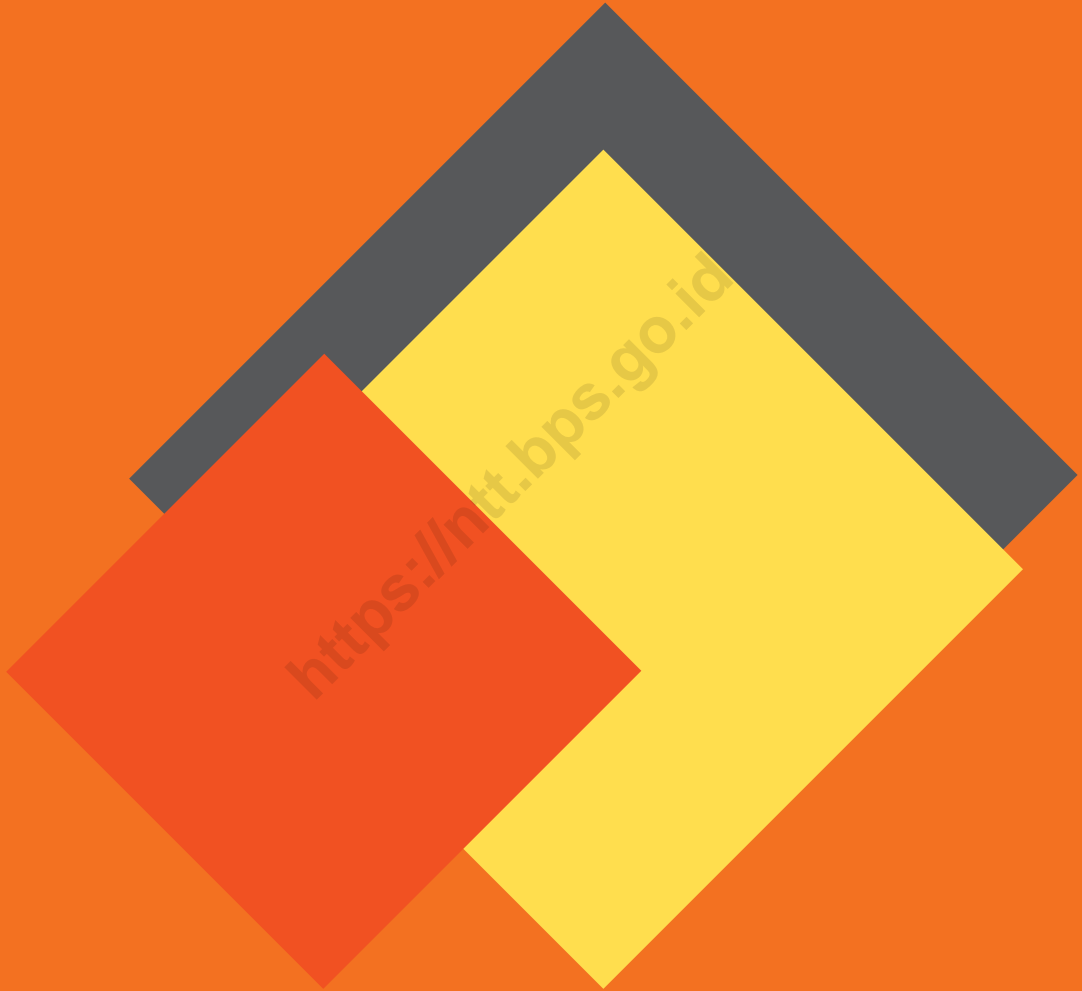
Tabel 3.

Persentase UMK yang Berbadan Usaha, Menggunakan Komputer, Menggunakan Internet dan Menjalinkan Kemitraan Menurut Kategori, 2017

Kategori	Berbadan Usaha	Menggunakan Komputer	Menggunakan Internet	Menjalinkan Kemitraan
B. Pertambangan dan Pengalihan	1,76	0,00	0,23	6,72
C. Industri Pengolahan	2,99	0,83	1,11	2,88
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	7,15	15,73	18,61	15,30
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	17,16	3,94	1,68	5,82
F. Konstruksi	21,14	16,98	14,28	8,52
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	11,12	1,86	2,89	8,51
H. Pengangkutan dan Pergudangan	11,46	0,77	1,69	1,69
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	14,13	2,13	3,48	1,85
J. Informasi dan Komunikasi	4,59	6,62	12,10	12,73
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	70,84	45,99	15,77	9,95
L. Real Estat	6,58	2,07	1,70	0,99
M, N. Jasa Perusahaan	25,40	32,62	27,00	11,07
P. Pendidikan	90,01	77,29	57,78	21,05
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	68,47	52,38	36,73	28,33
R,S. Aktivitas Jasa Lainnya	16,11	10,50	12,61	5,21
Total	11,47	4,86	4,98	6,46

Sumber: BPS, SE2016 Lanjutan





**PELAKU UMK
PERLU
MENINGKATKAN
KAPABILITAS**

Bagian

4

Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan sistem manajemen yang baik. Namun, sebagian besar usaha dilakukan secara perorangan. Karena skala usaha yang kecil dan pengelolaannya dilakukan secara sederhana, seluruh proses usaha atau produksi sampai pemasaran dilakukan sendiri oleh pengelola atau pengusaha. Selain itu, masih banyak UMK yang dibantu oleh pekerja keluarga/tidak dibayar. Hasil data SE2016-Lanjutan menunjukkan sekitar 26 persen pekerja UMK merupakan pekerja keluarga/tidak dibayar. Kategori yang paling banyak dibantu buruh tidak dibayar adalah Pertambangan dan Penggalian (Kategori B).

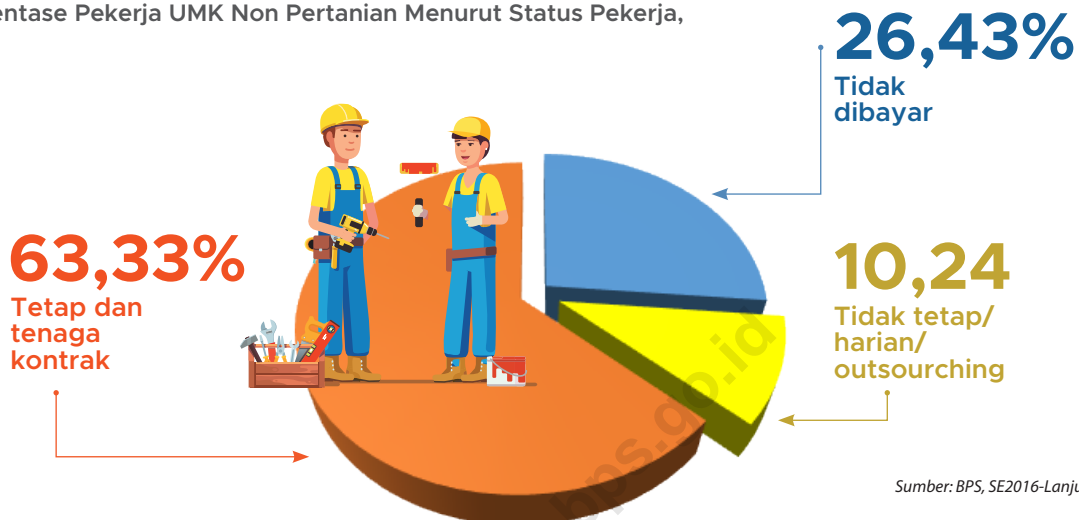
Peranan UMK dalam menggerakkan perekonomian tidak terlepas dari peran perempuan baik sebagai pengusaha maupun tenaga kerja. Secara umum, persentase pengusaha UMK yang berjenis kelamin perempuan sekitar 43 persen. Meskipun masih lebih rendah dari laki-laki, persentase ini dianggap cukup tinggi mengingat masih berlakunya stereotipe bahwa laki-laki

dianggap sebagai pencari nafkah utama. Berpijak pada hal tersebut dapat diduga jika UMK juga dijalankan sebagai penunjang perekonomian keluarga.

Secara umum kualitas pendidikan pengelola UMK di NTT masih rendah dimana hampir 50 persen berpendidikan SD atau tidak tamat SD. Pengelola dengan pendidikan SMA dan SMK juga cukup besar yakni mencapai 25 persen. Masih rendahnya pendidikan pengelola UMK menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha ini seperti, misalnya dengan memberikan pelatihan. Sayangnya, Hasil SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa pelaku UMK yang pernah mengikuti pelatihan hanya 5,10 persen.

**PELAKU UMK
PERLU
MENINGKATKAN
KAPABILITAS**

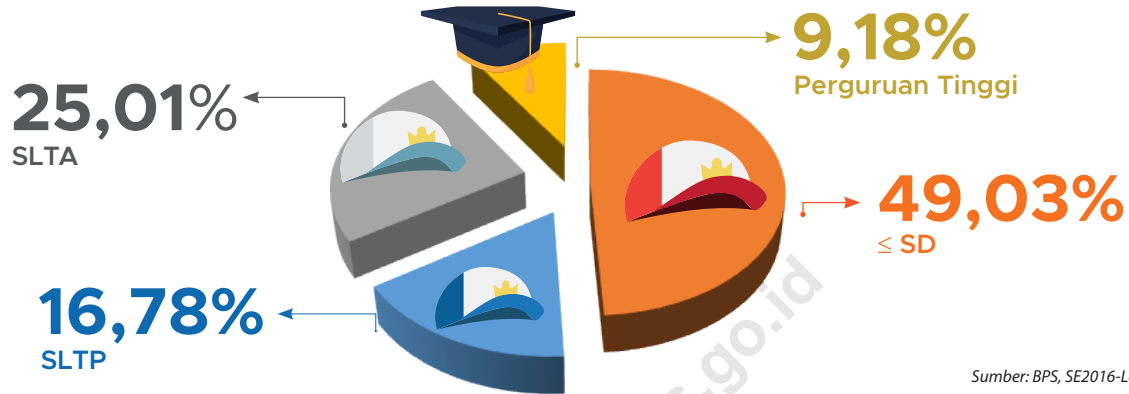
Gambar 4.1.
Persentase Pekerja UMK Non Pertanian Menurut Status Pekerja,
2017



Gambar 4.2.
Persentase Pengusaha UMK Non Pertanian Menurut Jenis Kelamin, 2017



Gambar 4.3.
Persentase Pengusaha UMK Non Pertanian Menurut Pendidikan, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 4.
Persentase Pekerja UMK Non Pertanian Menurut Kategori dan Status Pekerja, 2017

Kategori	Tetap dan Kontrak	Tidak Tetap/ Harian/ Outsourcing	Tidak Dibayar
B. Pertambangan dan Penggalian	44,03	13,92	42,04
C. Industri Pengolahan	53,05	10,45	36,50
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	68,89	1,22	29,89
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	75,37	9,05	15,58
F. Konstruksi	36,71	63,29	-
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	59,46	4,00	36,54
H. Pengangkutan dan Pergudangan	72,37	21,23	6,39
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	65,85	4,55	29,59
J. Informasi dan Komunikasi	65,91	0,93	33,16
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	85,93	3,39	10,67
L. Real Estat	77,13	0,43	22,43
M, N. Jasa Perusahaan	65,78	14,97	19,26
P. Pendidikan	92,91	6,58	0,51
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	77,88	11,66	10,46
R,S. Aktivitas Jasa Lainnya	75,03	10,28	14,69
Total	63,33	10,24	26,43

**KINERJA
USAHA DARI
SISI KEUANGAN**

Bagian

5

<https://tft.bps.go.id>

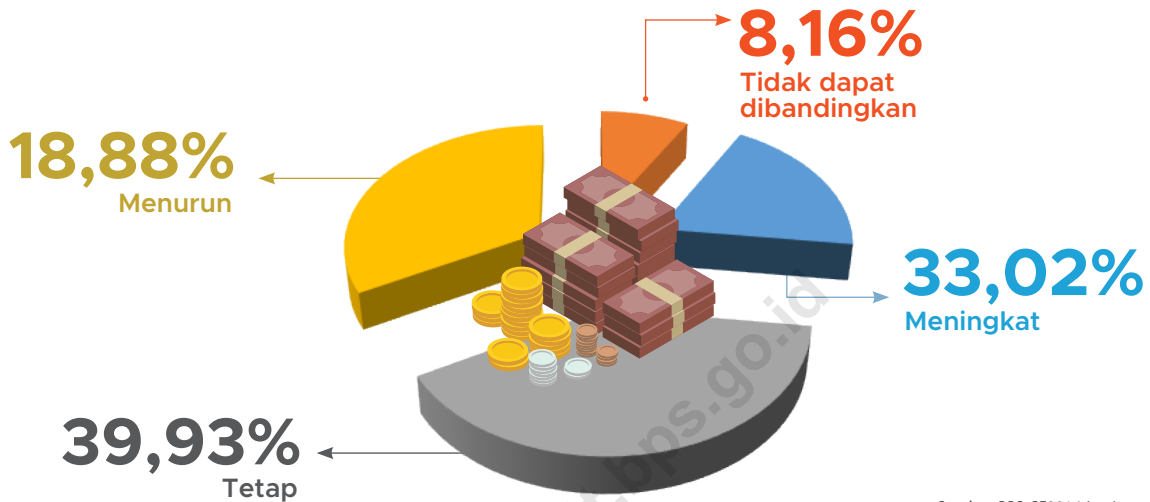
KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN

Kinerja usaha merupakan hasil dari kegiatan pemanfaatan sumber daya suatu usaha yang dapat diukur dengan beragam cara, salah satunya adalah laba usaha. Berdasarkan data hasil SE2016-Lanjutan, 33 persen pelaku UMK menyatakan perolehan labanya menunjukkan capaian yang positif. Namun, 19 persen menyatakan bahwa keuntungan mereka di tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selain laba usaha, rasio pengeluaran terhadap pendapatan (*cost to income*) juga digunakan untuk melihat tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha maka semakin baik atau semakin menguntungkan usaha tersebut. Tahun 2017, di NTT tercatat usaha Real Estat (Kategori L) merupakan kategori yang paling menguntungkan dengan rasio sebesar 0,19. Kategori tersebut mampu mendulang pendapatan hingga lima kali lipat biaya yang dikeluarkan. Sedangkan kategori yang paling tidak efisien adalah aktivitas Pendidikan (Kategori P) dengan rasio pengeluaran terhadap pendapatan 0,84.

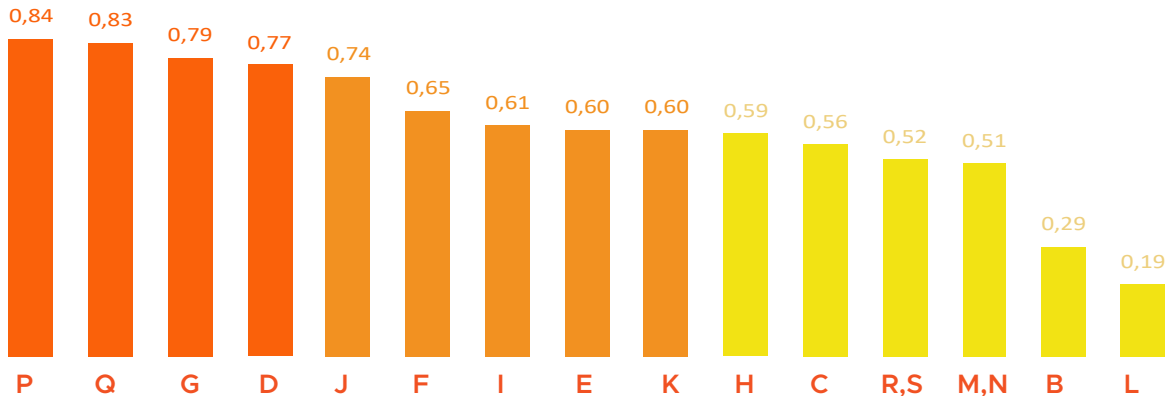
Namun demikian, Kategori L bukanlah usaha yang memberikan rata-rata balas jasa pekerja yang tertinggi. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial (Kategori Q) memiliki nilai balas jasa pekerja tertinggi, yaitu sekitar 27 juta per pekerja selama tahun 2017. Selanjutnya, Kategori P (Pendidikan) dan Kategori F (Konstruksi) dan memberikan balas jasa lebih dari 20 juta per pekerja.

Gambar 5.1.
Persentase UMK menurut Kondisi Laba 2016 dibanding 2015



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 5.2.
Rasio Pengeluaran terhadap Pendapatan menurut Kategori, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 5.3.
Rata-rata Balas Jasa dan Upah Pekerja UMK Non Pertanian Menurut Kategori
(Ribu Rupiah), 2017

Kategori	Balas Jasa
B. Pertambangan dan Penggalian	5.735
C. Industri Pengolahan	6.019
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	5.532
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	8.959
F. Konstruksi	22.623
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	10.244
H. Pengangkutan dan Pergudangan	6.992
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	12.482
J. Informasi dan Komunikasi	6.259
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	13.626
L. Real Estat	7.434
M, N. Jasa Perusahaan	12.690
P. Pendidikan	24.019
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	27.322
R,S. Aktivitas Jasa Lainnya	12.133
Total	16.743

PROSPEK DAN KENDALA USAHA

Bagian

6

<https://ntt.bps.go.id>

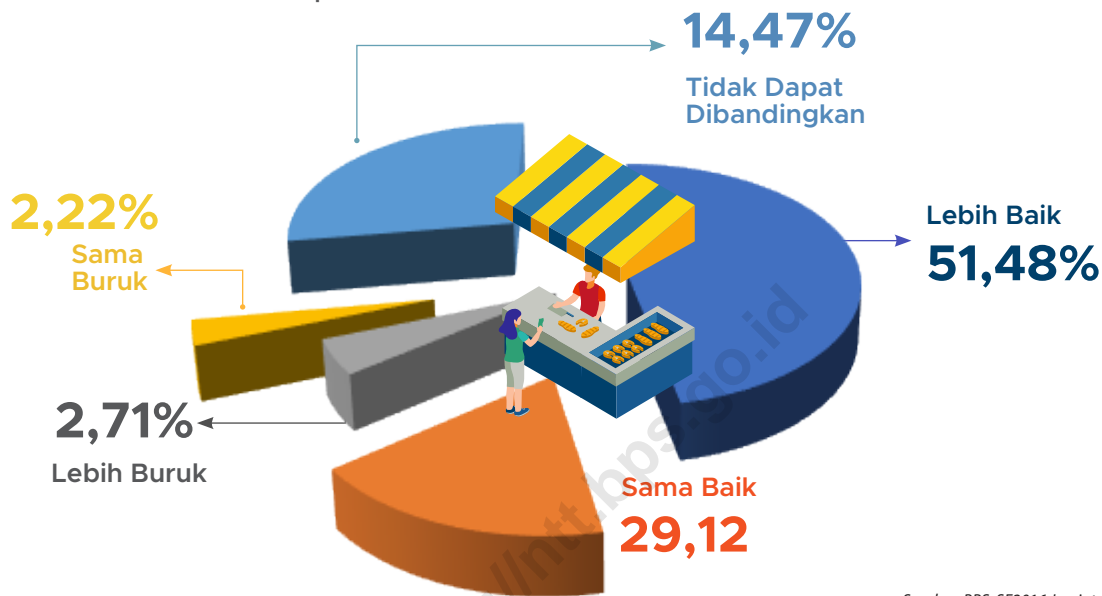
Pemerintah menargetkan adanya peningkatan usaha-usaha yang berpotensi tumbuh dan inovatif, yaitu usaha yang memiliki prospek bagus di masa mendatang. Dalam SE2016-Lanjutan, prospek adalah harapan atau kemungkinan, dalam hal ini prospek berkaitan dengan kondisi usaha atau tendensi bisnis ke depan baik dari sisi perolehan keuntungan, atau omset. Terdapat sebanyak 51 persen pengusaha UMK di NTT yang menyatakan bahwa usaha mereka akan lebih baik di masa mendatang.

Namun demikian, 86 persen UMK memiliki kendala dalam menjalankan usaha. Permasalahan permodalan/likuiditas, adanya pesaing dan pemasaran merupakan kendala yang paling banyak dihadapi. Karena itu, agar kondisi bisnis ke depan menjadi lebih baik, tentunya diperlukan upaya untuk mengurangi kendala yang dihadapi.

Permodalan merupakan faktor produksi utama yang harus ada pada setiap proses produksi atau usaha. Oleh sebab itu, akses kredit dari lembaga keuangan merupakan hal yang penting agar UMK dapat meningkatkan kapasitas usahanya. Kebijakan pemerintah dalam pemberian akses

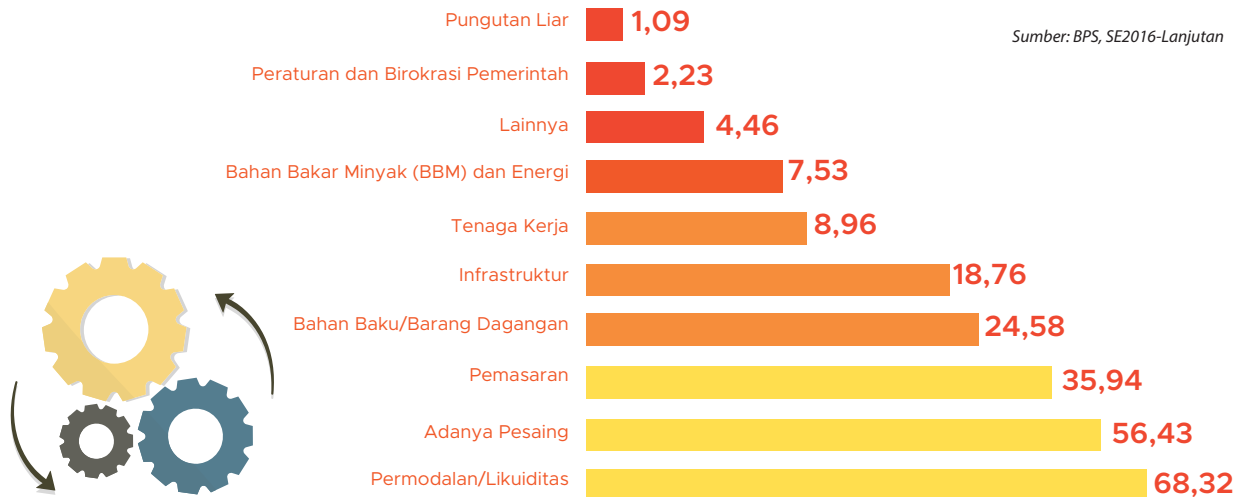
kredit untuk UMKM sebetulnya sudah sangat terbuka. Lembaga keuangan saat ini telah banyak memberikan berbagai jenis kredit yang meringankan. Bank Indonesia telah mewajibkan Bank Umum untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM (Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015). Namun hanya sekitar 12 persen usaha yang memperoleh/mengajukan kredit ke lembaga keuangan. Diantara UMK yang tidak menerima kredit, 47 persen menyatakan tidak/belum membutuhkan kredit dan memiliki alasan lainnya. Sedangkan bagi pengusaha yang membutuhkan kredit namun belum mengajukan/mendapatkan kredit adalah karena alasan bunga tinggi, tidak memiliki agunan, tidak tahu prosedur, prosedur sulit, dan usulan ditolak.

Gambar 6.1.
Persentase UMK Menurut Prospek UMK Tahun 2018



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 6.2.
Persentase UMK Yang Menyatakan Adanya Kendala Usaha Menurut Jenis Kendala, 2017

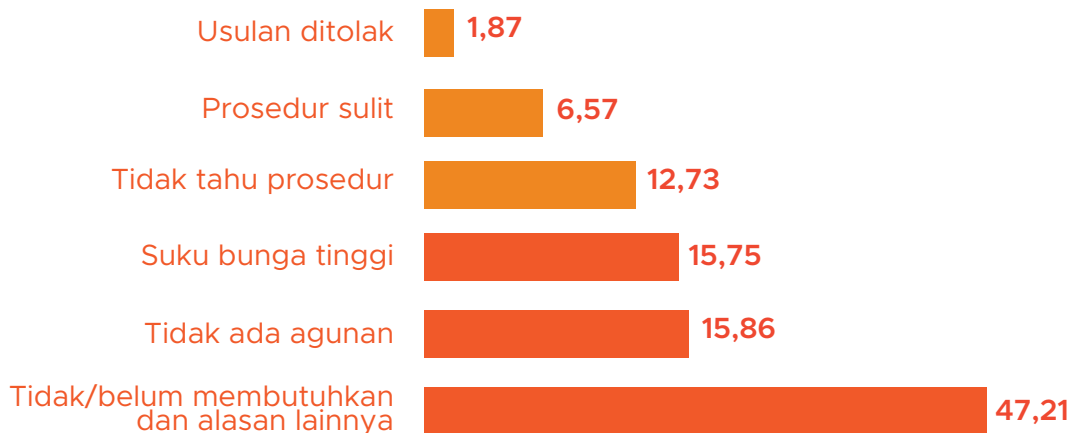


Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 6.3.
Persentase UMK Menurut Akses Permodalan dari Lembaga Keuangan, 2017



Gambar 6.4.
Persentase UMK yang Tidak Memperoleh/Mengajukan Kredit dari Lembaga Keuangan Menurut Alasannya, 2017



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jl. R. Suprpto No. 5 Kupang - 85111

Telp : (0380) 826289, 821755; Fax. (0380) 833124

Homepage: <https://ntt.bps.go.id/> E-mail : bps5300@bps.go.id

ISBN 978-602-6786-42-5



9 786026 786425 >